

Universitas Airlangga
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik
Surabaya 2007

ABSTRAK

Kebijakan Revitalisasi Kalimas merupakan kebijakan yang tidak hanya merevitalisasi air maupun kawasan di sekitarnya saja tapi juga dilakukan penataan-penataan sampai pada desain yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai *public space* (ruang publik) dan objek wisata baru. Peneliti bermaksud untuk menjawab apa saja ide atau gagasan yang mendasari Kebijakan Revitalisasi Kalimas, siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan bentuk keterlibatannya dalam proses Revitalisasi Kalimas, serta bagaimana implikasi ekonomi-politik dalam proses Kebijakan Revitalisasi Kalimas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan strategi penelitian melalui studi kasus. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang fenomena Kebijakan Revitalisasi Kalimas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Politik Kebijakan Perkotaan, aktor-aktor Kebijakan Perkotaan, dan kepentingan Aktor-aktor Kebijakan Perkotaan dengan pendekatan ekonomi-politik.

Ada beberapa ide atau gagasan yang mendasari Kebijakan Revitalisasi kalimas, yaitu: Berguru pada negara-negara di luar negeri (Ghuangzou dan Brisbane), Kebijakan berasal dari Walikota Purnomo Kasidi dan Gubernur Basofi Sudirman, Mengacu pada SK. Gubernur No. 93 tahun 1997, Kondisi lingkungan dan bangunan-bangunan liar, Potensi yang dimiliki Kalimas yang bisa dikembangkan untuk sektor wisata dan bisnis. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya selain Pemerintah Kota Surabaya sebagai instansi yang bertindak sebagai pembuat keputusan juga didukung oleh dinas/instansi yang terkait dalam prosesnya, selain itu terdapat Perum Jasa Tirta I (divisi Asa IV Surabaya) dan Pelindo III sebagai pihak investor, selain itu pihak investor lainnya berasal dari para pengembang TCM atau E-Square, Novotel, DTC, Pemerintah Belanda, Pemerintah Kitakyushu Jepang. Pihak selain investor yaitu berasal dari LSM dan Ormas seperti: WALHI dan Dewan Kota Surabaya, mereka dilibatkan ketika seminar-seminar yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan Kebijakan Revitalisasi Kalimas. Implikasi Ekonomi-politik yang terjadi dalam proses Revitalisasi Kalimas yaitu: Kalimas akan dijadikan sebagai objek wisata baru (*public space*) dan ladang bisnis, terjadi pengusuran terhadap warga strem Kalimas, terjadi Pro-kontra terhadap proses Kebijakan Revitalisasi Kalimas, dan ditemukan adanya fakta penyalahgunaan wewenang dinas/instansi yang terkait.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ide/gagasan yang mendasari Revitalisasi Kalimas dengan menunjuk Dinas/Instansi yang terkait dalam proses pelaksanaannya terjadi ketimpangan akibat kurang maksimalnya peran serta masyarakat baik melalui lembaga atau individu dalam prosesnya. Kurang

berpihaknya Pemerintah Kota Surabaya terhadap nasib korban-korban pengusuran ,akibat posisi mereka yang lemah. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya pro-kontra dalam proses Kebijakan Revitalisasi Kalimas. Pemerintah terlalu menitikberatkan bagaiman program tersebut bisa terlaksana dan menarik para investor sebanyak-banyaknya yang nantinya jika desain yang yang dibuat sesuai dengan yang direncanakan akan bisa meningkatkan PAD. Tentu saja pihak yang diuntungkan tidak hanya pihak-pihak formal tapi juga pihak investor

